

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TENGAH KENAIKAN HARGA BBM DESA SIMONIS KECAMATAN AEK NATAS KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Norma Yunita Pasaribu¹, Raden Deni Atmira²

¹Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Islam Sumatera Utara

²Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Islam Sumatera Utara

eMail: normapsrb@fisip.uisu.ac.id

Abstrak

Keterlibatan masyarakat desa dalam hal partisipasi diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat lewat kegiatan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang diadakan pemerintahan desa untuk menentukan rencana program kerja, melalui program kerja desa. Hasil musrenbangdes tersebut nantinya akan dijadikan sebagai kebijakan yang diterapkan pemerintahan desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada bab I pada poin ke 8 juga disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari penjelasan diatas, penulis menilai bahwasanya diperlukan upaya yang maksimum dan berkelanjutan agar tujuan-tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara menyeluruh serta membutuhkan kajian secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak mengeluarkan kebijakan khusus sebagai respons terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah desa hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tanpa adanya program atau inovasi kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat desa. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM masih perlu ditingkatkan, baik melalui penyusunan kebijakan yang lebih responsif maupun melalui optimalisasi program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan program-program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Desa, Harga BBM, Labuhan Batu Utara.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa atau biasa disebut dengan PEMDES adalah lembaga pemerintahan terendah di negeri Indonesia yang bertugas untuk mengurus suatu wilayah tingkat desa. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa untuk menyelenggarakan segala urusan dan

kepentingan masyarakat desa. Karena Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa, maka masyarakat desa dituntut untuk berpartisipasi dalam hal mengembangkan potensi desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam hal partisipasi diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat lewat kegiatan yang disebut Musyawarah Rencana

Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang diadakan pemerintahan desa untuk menentukan rencana program kerja, melalui program kerja desa. Hasil musrenbangdes tersebut nantinya akan dijadikan sebagai kebijakan yang diterapkan pemerintahan desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat

Menurut Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu proses dan tujuan, dimana proses pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Murliasari, 2021).

Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada keadaan yang ingin dicapai melalui perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya dan memiliki kekuatan atau pengetahuan berupa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi dan sosial percaya diri, mengungkapkan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat (Bismo & Sahputra, 2021).

Sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada bab I pada poin ke 8 juga disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari penjelasan diatas, penulis menilai bahwasanya diperlukan upaya yang maksimum dan berkelanjutan agar tujuan-tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara menyeluruh serta membutuhkan kajian secara komprehensif.

Ditengah kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan

akibat kenaikan harga BBM, tentu hal tersebut membawa dampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok sehingga mengakibatkan perekonomian masyarakat terganggu. Perekonomian masyarakat menurun selain akibat belum berakhirnya akibat Pandemi Covid-19, sekarang ini masyarakat menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.

Hal tersebut terlihat ditengah masyarakat di Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara yang mata pencaharian masyarakatnya hanya sebagai petani dan pedagang. Sehingga dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut yang berdampak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok menimbulkan keresahan serta kesulitan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah desa seharusnya mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu masyarakat desa ditengah situasi dan kondisi perekonomian yang tidak stabil tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi tentang “Pengaruh Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM Terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara”.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Arikunto, 2010). Misalnya seperti penilaian sikap atau

pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Penelitian deskriptif ini hanya menggambarkan objek penelitian, menggunakan analisis kualitatif dan tanpa pengujian hipotesis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif adalah untuk menggambarkan secara jelas keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan proses dan hasil yang dicapai (Creswell, 2017). Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif, tidak mengenal istilah pengambilan sampel dari populasi karna penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi, Namun bertujuan menggali informasi secara mendalam sehingga sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan.

Adapun fungsi dari informan dalam penelitian adalah memberikan informasi terkait dengan realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian Informan dalam penelitian ini terbagi atas 3 kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Informan kunci

Yaitu seseorang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang proses dan hasil yang dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena yang terjadi secara garis besar, tetapi juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini informan kuncinya adalah: kasi kesejahteraan dan kasi pemberdayaan

Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b. Informan utama

Yaitu seseorang yang mengetahui secara teknis dan detail serta terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan utama adalah kepala desa, ketua BPD Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.

c. Informan Tambahan

Yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi tambahan atau informasi sekunder tentang proses dan hasil yang dicapai sebagai pelengkap dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini informan tambahannya adalah: masyarakat Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No	Nama	Kelompok Informan	Keterangan
1	Syahrial Ritonga	Kunci	Kasi kesejahteraan
2.	Amrul Hajar Munthe	Utama	Kepala Desa Simonis
3.	Mansur Sagala	Utama	Ketua BPD Desa Simonis
4.	Idah, Amril, Yanti	Tambahan	Masyarakat Desa Simonis

(Sumber: Olahan Data, 2026)

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi yang berguna untuk

menjelaskan isi dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah pengertian dari beberapa teknik pengumpulan data :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumbernya atau objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan secara langsung data yang diambil dari objek penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber nya atau objek penelitian, dengan kata peneliti lain mendapatkan data melalui buku, jurnal dan beberapa sumber lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data secara konsisten. Sedangkan Kegiatan dalam analisis data penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Simonis merupakan sebuah desa yang menjadi lokasi perang pada masa penjajahan belanda, desa ini di berikan nama Simonis dikarenakan pada desa ini ada sebuah mata air bernama Aek Simonis yang menjadi sumber air terjun yang indah, sangkin indahnya terlihat halus air terjun yang jatuh halus dalam bahasa asli daerah ini disebut “monis” karenanya desa ini disebut desa Simonis dan mata air sumber air terjun itu disebut Aek Simonis.

Simonis dahulunya hanya tiga dusun yaitu Simonis, Bandar selamat, dan

Sitarundi. Namun pada masa kepemimpinan bapak Alimuddin Nainggolan dusun di desa Simonis ditambah menjadi lima dengan hadrinya dusun II SImpang Bandar Selamat dan dusun III Wonosari, dan pada masa kepemimpinan bapak Amrul Hajari Munthe di tambah satu dusun lagi yakni Dusun VI Adian Kandis sehingga Simonis memiliki enam dusun.

Dahulu sebelum Indonesia merdeka desa Simonis masih berbentuk kerajaan dengan raja yang bernama Raja Sitarundi, namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 Simonis yang sebelumnya berbentuk kerajaan Sitarundi diubah menjadi Desa dengan pimpinan pertamanya bapak Ahmad Dasopang (1945-1955).

Desa Simonis memiliki pariwisata yang berpotensi tinggi untuk dilestarikan dan di explore. Pariwisata desa Simonis merupakan pariwisata alam berupa pemandian yang indah dan bagus sebagai tempat untuk rekreasi keluarga. Selain itu pariwisata desa Simonis yang berupa tempat pemandian ini juga berpotensi untuk di jadikan lokasi arung jeram, hal ini dikarenakan arus sungai nya yang cukup deras yang berpotensi untuk digunakan sebagai lokasi arung jeram. Desa Simonis merupakan desa yang selain memiliki potensi wisata juga memiliki potensi pertambangan. Simonis memiliki pertambangan batu padas yang cukup luas yang saat ini dimiliki oleh pribadi.

Karena Tidak adanya kebijakan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan kesejahteraan masyarakat terkait kenaikan harga BBM di desa simonis kecamatan aek natas kabupaten labuhanbatu utara, Hal ini berdampak pada sektor perekonomian masyarakat

yang kian menurun dikarenakan kenaikan harga BBM dan harga beli bahan pokok yang melonjak mahal sehingga Menyebabkan keresahan dan kemiskinan di desa simonis mengalami kenaikan kerana penghasilan masyarakat di desa tersebut hanya bersumber dari sektor pertanian dan pedagang yang dimana kedua sektor tersebut tidak terlepas dari penggunaan BBM.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintahan pusat tentang kenaikan harga BBM ini berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebab BBM yang setiap hari digunakan masyarakat untuk bekerja oleh karena itu roda aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami kesulitan seperti tidak dapat memenuhi sandang dan pangan dalam keluarga, dan meningkat nya angka tindak kejahatan di desa simonis (Putra et al., 2023).

Seharusnya pemerintahan desa memberikan perhatian kepada masyarakat dalam masa kenaikan BBM, dengan memberikan kebijakan dalam peraraturan yang seharusnya di musyawarahkan melalui musdes (musyawarah desa) yang nanti nya akan dikeluarkan sebagai sebuah kebijakan pemerintah desa dalam tanggap terhadap setiap situasi atau permasalahan yang mambawa dampak bagi masyarakat desa(Firdaus & Hartono, 2025).

Kemudian, Faktor-faktor Penghambat Kebijakan Pembedayaan Masyarakat Di Tengah Kenaikna Harga BBM Desa Simonis Kecamatan Aeknata Kabupaten Labuhanbatu Utara beberapa hal, yakni:

1. Kurang Nya Edukasi Dan Pemahaman Pemdes (Pemerintah

Desa) Dalam Mengeluarkan Kebijakan

2. Tidak Adanya Anggaran Yang Memadai Untuk Mendukung Kebijakan Yang Ada
3. Masyarakat Belum Terberdayakan Sehingga Dalam Menjalankan Kebijakan Belum Terealisasikan Dengan Baik
4. Minimnya Program Kerja Yang Ada Di Desa Sehingga Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Nya Jauh Tertinggal
5. Tidak Ada Nya Kepedulian Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat Terkait Kenaikan Harga BBM.
6. Tidak Adanya Keterbuakaan Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Membentuk Dan Menjalan Kan Setiap Program Kerja Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yaitu tentang pengaruh kebijakan pemerintah menaikan harga BBM terhadap pemberdayaan kesejahteraan masyarakat desa simonis kecamatan aek natas kabupaten labuhanbatu utara dimana peneliti memperoleh hasil wawancara dengan kasi kesejahteraan desa bahwa menurut kasi kesejahteraan yaitu bapak Syahrial Ritonga, bahwa kebijakan pemerintahan desa dalam menangani dampak kenaikan harga BBM di desa simonis belum ada ditetapkan oleh pemerintah desa, baik itu melalui usulan BPD sewaktu musrembangdes maupun musdes. Beliau menyebutkan untuk saat ini program kerja kasi kesejahteraan hanya menjalankan program yang sudah tersusun dalam buku RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Oleh karena itu masyarakat desa simonis mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta berdampak pada penurunan perekonomian desa sehingga mengganggu sektor SDM dan SDA yang ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa bapak Amrul Hajar Munthe, peneliti memperoleh hasil bahwa kebijakan kenaikan harga BBM itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan sudah pasti semua daerah di Indonesia merasakan dampak kenaikan harga BBM tersebut tidak terlepas juga di desa simonis. Kepala desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa tidak bisa mengeluarkan sembarangan kebijakan besar dari kenaikan harga BBM ini karena harus melalui banyak tahapan terlebih dahulu, walaupun begitu program bantuan seperti PKH, bantuan sandang pangan yang sudah ditetapkan dalam program kerja tetap berjalan.

Memang kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM itu kurang efektif apalagi untuk masyarakat di desa-desa yang masyarakat desanya cenderung lebih bergantung menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan hanya sebatas untuk menjalankan kendaraan saja. Oleh karena itu kenaikan BBM ini membawa dampak kepada ikut sertanya kenaikan harga bahan pokok di setiap daerah yang mana artinya kenaikan BBM adalah kebijakan yang kurang tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak mengeluarkan kebijakan khusus sebagai respons terhadap kenaikan harga Bahan

Bakar Minyak (BBM). Pemerintah desa hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tanpa adanya program atau inovasi kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyaluran bantuan kepada masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam ketepatan sasaran penerima bantuan. Masih terdapat masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terakomodasi, sementara di sisi lain terdapat penerima bantuan yang dianggap kurang memenuhi kriteria. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat serta mengurangi efektivitas program bantuan dalam meringankan beban ekonomi akibat kenaikan harga BBM.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM masih perlu ditingkatkan, baik melalui penyusunan kebijakan yang lebih responsif maupun melalui optimalisasi program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan program-program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah desa disarankan untuk lebih proaktif dalam menyusun kebijakan dan program yang dapat membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Meskipun kebijakan

harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah desa tetap dapat mengambil langkah strategis melalui program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, maupun kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa perlu mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat menjadi sumber penguatan ekonomi masyarakat. Pengembangan unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi desa diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM. Di samping itu, proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial perlu dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaat bantuan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selanjutnya, pemerintah desa diharapkan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui musyawarah desa dan komunikasi yang terbuka sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat semakin harmonis serta mampu menciptakan pembangunan desa yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Bismo, P. A., & Sahputra, R. E. (2021). Increasing the Effectiveness of Village Development Through the Simplification of Village Funds Disbursement. *Matra Pembaruan*, 5(2), 77–88.

Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firdaus, F. A., & Hartono, D. (2025). The Impact of the One Price Fuel Oil (BBM) Program on the 3T Rural Economy in Indonesia. *JEJAK*, 18(1), 24–35.

Murliasari, R. (2021). Implementation of Village Fund Management Policy Affirmation in Village Development. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 555–567.

Putra, M. Y. D., Priyadi, B. P., & Widowati, N. (2023). Analisis pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 487–502.

DAFTAR BACAAN

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*